

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Desa sebagai wadah Pemerintahan yang paling kecil mengurus banyak hal yang meliputi urusan administrative dan lain sebagainya yang memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), dana/anggaran maupun sarana prasarana penunjang tercapainya berbagai urusan yang diemban desa. Dalam menunjang urusan desa, Pemerintah Pusat merumuskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan kepastian hukum atau jaminan kepada setiap desa yang menerima dana pemerintah melalui anggaran nasional dan lokal melalui penyaluran dana desa dan alokasi dana desa. Dana desa adalah suatu penunjang pelaksanaan tugas internal dan kegiatan pemerintahan desa. Untuk mengatur pengelolaan dana desa, Pemerintah menerbitkan regulasi PP No.22 Tahun 2015.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014, dana desa merupakan dana yang dimiliki pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/Kota. Dalam mengelola pemerintah perlu memperhatikan asas asas sebagai berikut:

- a) Transparan adalah prinsip keterbukaan dengan memberikan penglihatan dengan rinci kepada masyarakat agar mendapatkan informasi terkait peyelenggaran pemerintah serta pengelolaan dana desa.

- b) Akuntabel merupakan prinsip pengelolaan dalam suatu kebijakan untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.
- c) Partisipatif merupakan Pelaksanaan Pemerintahan desa baik organisasi desa maupun komponen masyarakat desa.
- d) Tertib dan disiplin anggaran merupakan Pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan aturan-aturan sebagai dasarnya.

Dalam Pasal 19 PP No. 60 Tahun 2014 disebutkan bahwa Dana Desa digunakan sebagai Belanja Desa dengan ketentuan:

- a. Penggunaan dana desa untuk menanggung berlangsungnya tata kelola pemerintahan seperti kemasyarakatan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Dalam pembangunan desa menggunakan dana desa terdapat skala prioritas adalah pengembangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan diatas menegaskan jika dana desa hanya diutamakan sebagai pelaksanaan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pedoman terhadap pengelolaan keuangan desa (Dana Desa) diatur oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pengelolaan dana desa ialah “Keseluruhan kegiatan berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.”

Pedoman mengenai pengelolaan keuangan desa (Dana Desa) diatur oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi yang diterbitkan oleh Bupati dibuat sebagai bentuk upaya *controlling* Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa. Kabupaten Pati, pengelolaan dana desa didasari pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan setiap tahun anggaran. Dalam penyalurannya, Dana Desa dibagi ke dalam tiga tahapan:

1. Tahap I : 20% Bulan Januari sampai dengan paling lambat bulan Juni.
2. Tahap II : 40% bulan Maret sampai dengan paling lambat bulan Juni.
3. Tahap III : 40% pada bulan Juli sampai paling lambat bulan Oktober.

Dana Desa tersebut disalurkan dan dikelola oleh Kepala Desa. Kepala Desa berkewajiban untuk :

1. Membuat APBDes
2. Menyampaikan laporan penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya jika sudah memasuki tahap II dan III
3. Transparansi rencana dana desa penggunaan setiap tahapnya
4. Memberikan rekaman buku RKD

Dalam PERBUP Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pemerintah melakukan *controlling* dan pengawasan alur dalam pengelolaan keuangan desa terkait dengan dana desa maka dari itu Kepala Desa bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana desa berdasarkan prosedur yang disetujui oleh pemerintah pusat, yakni:

1. Perencanaan
 - a) Memberikan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perencanaan

- b) Memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi
- c) Memberikan kepastian waktu kepada masyarakat
- d) Perencanaan sesuai dengan tujuan dari awal.

2. Penganggaran

Memberikan informasi transparansi anggaran terkait Dana Desa.

3. Pelaksanaan

- a) Memberikan informasi transparansi dana kepada masyarakat.
- b) Tepat dan bersih dalam memberikan alokasi sumber anggaran.
- c) Sesuai dengan APBDes yang sudah ditentukan.

4. Penatausaha

- a) Memberikan informasi masyarakat tentang penjabaran keuangan 1 tahun anggaran.
- b) Memberikan informasi transparansi kepada masyarakat sesuai dengan program terkait dana desa.

5. Pelaporan

Memberikan hasil penggunaan keuangan desa sesuai dengan APBDes yang telah ditentukan.

6. Pertanggung jawaban

Keseluruhan rencana yang dapat direalisasikan sesuai dengan target dalam pertanggung jawaban oleh Kepala Desa.

Pada konteks pengelolaan dana desa di Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagian masyarakat beranggapan bahwa peran kepemimpinan Kepala Desa Waturoyo terhadap pengelolaan dana desa untuk

pembangunan desa sesuai dengan semestinya namun sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa kepemimpinan Kepala Desa dalam mengelola dana desa masih kurang. Pada masa Kepemimpinan Kepala Desa Waturoyo Sis Susilo, yang terpilih dan mulai menjabat pada tahun 2015 untuk periode 2015-2021 telah menggunakan dana desa diperuntukkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat contohnya seperti pembangunan saluran irigasi, pembangunan talud, perbaikan jalan dan lain-lain. Dari sudut pandang lain, masyarakat menginginkan adanya perbaikan jalan penghubung antar desa guna meningkatkan aktivitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari namun aspirasi masyarakat belum di tindak lanjuti oleh kepala desa. Hal inilah yang membuat masyarakat merasa bahwa kepala desa kurang tanggap dalam merespon aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa.

Desa Waturoyo mempunyai berbagai macam potensi yang mampu dicari dan dikembangkan. Seperti halnya lahan pertanian dan peternakan yang merupakan mata pencaharian masyarakat desa Waturoyo. Banyak masukan dari masyarakat untuk pengembangan potensi tersebut seperti pembentukan organisasi masyarakat. Namun kurang adanya perhatian dari pemerintah Desa Waturoyo mengakibatkan potensi tersebut tidak berkembang.

Di sisi lain, selama periode kepemimpinan Kepala Desa Sis Susilo Desa Waturoyo juga mengalami perkembangan yang cukup baik. Dalam penilaian status desa membangun, Desa waturoyo mengalami kenaikan status, dari awalnya desa tertinggal menjadi desa berkembang pada tahun 2019 dan dapat menjadi Desa maju apabila dapat mengoptimalkan potensi dari desa. Namun,

itu dirasa belum cukup, karena sebagian masyarakat masih menganggap kepemimpinan Kepala desa Sis Susilo menanggapi respon terhadap aspirasi dan prioritas kebutuhan masyarakat yang bersumber dari dana desa. Didasari dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meninjau lebih jauh bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu dalam riset ini menegaskan dengan judul ***“KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018-2019)”***

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Kepemimpinan kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019 di Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Kepemimpinan Kepala Desa Waturoyo dalam penyelenggaraan Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019. Di tahun tersebut Desa Waturoyo baru saja naik tingkatan dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Penelitian ini dilakukan juga untuk mendeskripsikan kepemimpinan kepala desa di dalam mengorganisir pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola dana desa di Desa Waturoyo.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan, terutama dalam bidang studi ilmu politik, yaitu mengenai kepemimpinan Kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.
2. Memberikan pengetahuan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan melalui dana desa yang transparan terutama faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang di amanahkan Kepala desa.

1.4.2. Manfaat praktis

Selain memiliki tujuan seperti yang telah disebutkan diatas, penelitian tentang kepemimpinan dalam mengelola Dana Desa ini juga memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai evaluasi pemerintah dalam melakukan pembinaan untuk Pemerintahan Desa sehingga dapat mengoprasikan dana desa dengan baik.

2. Kegunaan Akademis

Untuk sivitas akademika, hasil penelitian ini diharapkan sebagai dokumen akademik yang bermanfaat, sebagai acuan bagi akademik untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan dana tingkat desa.

I.5. Kerangka Teori

1.5.1. Kepemimpinan

Kepemimpinan hanya mampu dijalankan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai keterampilan kepemimpinan. Terlepas dari hal itu pemimpin juga dapat mempengaruhi posisi/pendapat seseorang atau sekelompok orang, orang yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah seseorang yang dapat membuat rencana yang strategis, kerja sama, melaksanakan percobaan, dan pemimpin pekerjaan guna memenuhi tujuan bersama. Selain itu, pemimpin dapat menggabungkan semua elemen kekuatan padaseorang pemimpin, serta karakteristik kepribadian dan keterampilan sosial yang dapat memengaruhi perilaku individu lain.

Terdapat dua jenis kepemimpinan, antara lain kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Pemimpin formal wajib mempunyai kewenangan formal yang ditetapkan oleh organisasi, sedangkan pemimpin informal, wajib mempunyai kemampuan mempengaruhi setiap individu atau kelompok masyarakat, Salah satu faktor situasional yang akan semakin mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dalam sepuluh tahun mendatang adalah hubungan antara pemimpin dan pengikut. Termasuk relasi memiliki interaksi antara individu-individu yang memiliki motivasi dan potensi daya yang berbeda, termasuk kemampuannya. Kepemimpinan dilihat juga dari peran kepemimpinannya. Peran kepemimpinannya dan Fungsi kepemimpinannya, yakni:

1. Tugas Kepemimpinan

Tugas dari pemimpin yaitu sebagai penggerak, pembimbing dan pengawas pekerjaan dari karyawan diberbagai departemen atau unit kerja, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dapat mencapai hasil yang terbaik guna mencapai tujuan organisasi. Pada buku Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen karya Soewarno Handyaningrat, penjelasan mengenai kepemimpinan merupakan: “Kepemimpinan adalah sebagai suatu proses dimana pimpinan digambarkan memberikan perintah atau pengarahan, bimbingan atau mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan” (Handyaningrat, 1984: 64).

2. Fungsi Kepemimpinan

Kepemimpinan yang efektif hanya dapat dicapai sesuai dengan peran dan fungsi. Peran kepemimpinan berkaitan langsung terhadap kondisi sosial terhadap kehidupan kelompok maupun organisasi manapun, artinya tiap-tiap pemimpin masuk dalam konteks, bukan di luar konteks. Kepemimpinan memiliki fungsi yaitu sebagai fenomena sosial, yaitu kegiatan dilakukan dalam interaksi antar individu yang berlatar belakang sosial suatu kelompok. Fungsi kepemimpinan yaitu sangat mempengaruhi kemajuan suatu organisasi. Pembagian kerja dalam internal organisasi tidak dapat dilakukan secara normal. Pada buku berjudul

Teori dan Praktek Kepemimpinan karya Sondang P. Siagian menjelaskan fungsi kepemimpinan yaitu:

- a. Pimpinan sebagai penentu kendali untuk mencapai tujuan.
- b. Pemimpin sebagai garda terdepan dalam berbicara dengan organisasi maupun pihak lain yang bersangkutan.
- c. Pemimpin bisa menjadi penggerak komunikasi antar anggota
- d. Pemimpin sebagai penghubung yang baik, khususnya dalam hubungan internal, seperti menangani masalah.
- e. Pemimpin sebagai integrator yang netral, rasional, efektif, dan objektif. (Siagian, 1999:47).

3. Peran Kepemimpinan

Peran kepemimpinan sangat penting dalam organisasi maupun dalam lembaga swasta dan lembaga pemerintah. Dalam organisasi tersebut, keberhasilan organisasi sangat tergantung pada peran kepemimpinan dan pelatihan bawahan sehingga tujuan dan sasaran organisasi atau institusi dapat tercapai.

Sifat kepemimpinan dapat dilihat dari beberapa aspek tidak lain dengan adanya dorongan dari individual, pada buku Kepemimpinan dan perilaku organisasi, Vietzal rivai mengemukakan bahwa yang dapat mendukung dari diri seorang pemimpin yakni :

a. Sifat

Karakteristik seorang pemimpin akan mempengaruhi perilaku, tindakan, perbuatan, dan keputusan yang akan diambil. Sifatnya adalah pemimpin memiliki landasan dan modal awal antusiasme. Pemimpin mencapai efektivitas dengan mengembangkan karakteristik individu pemimpin.

b. Perilaku

Ekplorasi pemikiran tentang perilaku seseorang yang dapat menentukan keefektifan kepemimpinan mulai dikembangkan sejak akhir tahun 1940-an, perilaku tersebut berkaitan dengan pengaruh pada prestasi dan kepuasan dari peneliti yang mengeksplorasi hal ini.

c. Kepemimpinan Situasional

Salah satu pendekatan dalam kepemimpinan menyatakan bahwa pemimpin dapat mengerti perilaku diri sendiri, sifat dari bawahannya, dan situasi yang menggunakan model kepemimpinan tertentu. Dalam hal ini termasuk pendekatan pemimpin dalam mengasah keterampilan memahami sifat atau perilaku manusia.

1.5.2. Pengelolaan Dana Desa

Peter Salim dan Yenny Salim (2002, hal. 695) menyatakan bahwa pengelolaan merupakan mengendalikan, memimpin, mengusahakan dan mengatur agar suatu keadaan dapat stabil serta bertanggung jawab atas

pekerjaan tertentu. Dalam artiannya bahwa memimpin sama dengan mengelola suatu tujuan yang akan di realisasikan, dalam masa jabatannya dengan pengelolaannya pemimpin ditegaskan untuk selalu memberikan perencanaan yang baik serta memberikan pertanggung jawaban dalam organisasi yang di bentuk (Depdikbud, 1995/1996: 1-2).

Pengelolaan merupakan sebuah prinsip untuk mengatur kinerja dalam organisasi yang terdapat sumber daya manusia beserta elemen yang bersangkutan dengan Pengelolaan, sehingga pengelolaan merupakan prinsip penting untuk kemajuan sebuah organisasi yang di landasi system inventaris yang efektif guna melengkapi kebutuhan organisasi dan megembangkan tujuan organisasi sesuai dengan pencapaiannya. Contoh seperti BUMDes dalam pemerintahan desa yang merupakan garda terdepan dalam perkembangan desa bisa dilihat dari cara pemerintah desa mengelola keuangan atau dana pemerintah daerah untuk pemerintah desa. Kemudian dari segi pelayananan serta kebutuhan sumber daya manusia dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat supaya tercapai hasil dan harapan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa memiliki siklus penting dalam 1 tahun anggaran seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, di bawah ini bentuk gambarann siklus pengelolaan keuangan desa:

Gambar 1. 1 Siklus Pengelolaan Dana Desa



Sumber : www.keuangandesas.info.

Hal ini dapat diperhatikan guna keidisiplinan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Pendapatan yang sesuai dengan SDM yang dimiliki.
2. Pengeluaran yang mengikuti jumlah penerimaan
3. Pencatatan keuangan desa (APBDES dan Kas Desa)

Dengan Dana Desa pemerintah desa menggerakkan tindakan yang membuat perkembangan dan peningkatan ekonomi desa tertata dengan baik. Pemerintah desa melakukan kewajibannya menuntaskan program dana desa dari pemerintah pusat sesuai tujuan serta fungsi dana desa yang telah di sepakati bersama, Maka dari itu perlu di ketahui Tujuan dan Fungsi Dana Desa yaitu:

1. Tujuan Dana Desa

- a. Mengembangkan pelayanan Masyarakat
- b. Memutus tali kemiskinan
- c. Menstabilkan ekonomi desa

- d. Menyeimbangkan pembangunan antar desa
- e. Masyarakat menjadi alasan utama untuk pembangunan

(sumber :Buku-pintar-dana-desa)

2. Fungsi Dana Desa

APBN yang merupakan sumber utama dalam membiayai keberlangsungan pemerintahan desa, seperti melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat. Kemudian anggaran dari Negara ditransfer lewat APBD lalu dibagi rata untuk Desa yang disebut dengan Dana Desa.

(Sumber: PP No.60 Tahun 2014 jo PP No.22 Tahun 2015)

I.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Kepala Desa merupakan aktor utama dalam berperan membentuk suatu gerakan baru termasuk peran membangun, kerjasama, menanggapi, membentuk serta mentransparasikan Pengelolaan:

Tabel 1.1 Pengelolaan Dana Desa

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Perencanaan	Pemerintahan Desa menyusun rencana untuk membangun desa berpedoman terhadap kewenangannya perencanaan program pembangunan melalui pendanaan dana desa dalam kurun waktu tertentu.	1. Pelaksanaan 2. Musyawarah 3. Perencanaan 4. Pembangunan desa
2.	Penganggaran	Setelah rencana program pembangunan melalui pendanaan dana desa disepakati maka	1. Pendanaan 2. Musyawarah 3. Pendapatan 4. Transparansi

		dilanjutkan proses penyusunan anggaran dana desa	
3.	Pelaksanaan	Merealisasikan anggaran guna pembangunan desa berawal dari 1 Januari sampai 31 Desember yang tercatat dalam APBDes	1. Pelaksanaan 2. Partisipasi
4.	Penata usaha	Pengelolaan pencatatan pelaporan kebutuhan selama 1 tahun anggaran.	1. Administratif 2. Pengendalian uang 3. Transparasi
5.	Pelaporan	Tahap pelaporan adalah tahap terakhir dari kinerja 1 tahun anggaran untuk di pertanggung jawabkan.	1. Laporan 2. Pelaksanaan 3. Hasil program
6.	Pertanggung jawaban	Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan tiap tahun terakhir anggaran di laporkan kepada Bupati/Walikota pada musyawarah desa	1. Evaluasi 2. Program

I.7. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian pada judul “Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Dana Desa” adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Metode deskripsi keseluruhan berdasarkan kata-kata atau bentuk bahasa, dalam konteks khusus asli dan menggunakan beberapa metode alamiah. Ini berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tantangan dan faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan.

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian jenis deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau paparan secara mendalam dengan metode wawancara, sehingga dalam penelitian kualitatif menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Selain itu, tipe penelitian sebagai alat bantu penelitian, alat bantu fisik seperti kamera, alat tulis, pedoman tata cara dan *voice recorder*.

Jenis penelitian metode kualitatif deskriptif didasari oleh pemikiran rasional dan menekankan pada objektivitas. Dan alasan di pilihnya metode kualitatif deskriptif adalah untuk mendalami materi yang sedang diteliti secara lebih mendalam dan tajam, di dalam metode ini juga dapat memperjelas dan memperluas penelitian yang sedang diteliti. Tujuannya untuk mencari perihal dimasyarakat yang tidak dapat di kuantitatifkan. Seperti adanya pengelolaan dana desa yang melibatkan kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat direalisasikan oleh pemerintah desa menggunakan program pemerintah yaitu dana desa.

1.7.2. Tempat penelitian

Peneliti ini dilaksanakan di Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Penentuan lokasi berdasarkan data dari peneliti yaitu Kepempimpinan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

1.7.3. Subyek penelitian

Subyek penelitian merupakan narasumber yang akan ditanyai informasi seperti Pemerintah Desa, Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Waturoyo, mengenai penelitian tentang kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Tabel 1. 2 Daftar Informan Penelitian

UNSUR	KETERANGAN
PEMERINTAH DESA	Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa
BPD	Badan Pengawas Desa
MASYARAKAT	Ketua RT, Ketua RW dan Masyarakat yang berkaitan tentang pembangunan yang menggunakan Dana Desa
PEMERINRTAH KECAMATAN DAN KABUPATEN	Tim Verifikasi Kecamatan dan Tim Verifikasi Kabupaten dan

1.7.4. Sumber data

Dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode riset lapangan dan bentuk sumber, yaitu:

- a) . Data Primer yaitu data didapatkan secara langsung melalui objek penelitian. Data berasal dari jawaban wawancara yang diajukan kepada subjek penelitian terkait kepemimpinan Kepala Desa Waturoyo dalam pegelolaan Dana Desa.
- b) . Data Sekunder yakni data didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka yang berhubungan terhadap penelitian.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara didapatkan informasi primer dari narasumber berinteraksi secara langsung. Kelemahan wawancara adalah tingkat komprehensif pada hasil wawancara berpacu dengan peneliti dalam menggali informasi kepada narasumber. Narasumber yang dipilih sebagai subjek penelitian dimulai dari:

- a. Sis Susilo, Kepala Desa Waturoyo
- b. Kunjung Wijayani, Sekertaris Desa Waturoyo
- c. Sahal, Bendahara Desa Waturoyo
- d. Sugiyanto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Waturoyo
- e. Teguh Pristiwantoro, Tim Verifikasi Kecamatan Margoyoso,
- f. Indah Pebriana W, S.STP, M,Si, Tim Verivikasi Kabupaten Pati
- g. Masyarakat Desa Waturoyo.

Narasumber seperti Kepala Desa untuk mengetahui pelaksanaan APBDes kemudian Sekertaris Desa dan Bendahara Desa untuk mencari informasi administrasi pengelolaan APBDes, bagian Masyarakat untuk menggali data mengenai tanggapan masyarakat untuk melaksanakan APBDes, dan Tim Verifikasi kecamatan dan Tim Verifikasi Kabupaten untuk mencari informasi mengenai pengawasn terhadap Dana Desa di Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

2. Observasi

Teknik observasi didapatkan dari pengumpulan data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Observasi berarti pengamatan bertujuan untuk memahami pola, norma, dan makna perilaku dari narasumber penelitian. Observasi pada penelitian menggunakan Observasi non-partisipan yang mana peneliti tidak terlibat aktif dalam kehidupan narasumber namun hanya menjadi pengamat independen.

3. Dokumen

Kajian dokumen disini dilakukan untuk memperkuat kajian dalam data.

1.7.6. Analisis data dan Interpretasi data

Data penelitian kualitatif didapatkan dari beberapa sumber, dengan mengumpulkan data wawancara dan studi pustaka yang mudah dipahami dan informasinya akurat. Analisis data menurut Bodgan dan Biklen (dalam Moloeng, 2007, hlm 248) merupakan upaya dilakukan menggunakan data, mengorganiskan data, menyeleksi menjadi satu yang bisa dikelola, mensitesiskannya, menentukan pola, menentukan topik penting yang dipelajari dan menentukan penyampaian kepada pembaca. Analisis data serta intersepsi data menuurut (Moloeng, 2007, hlm. 247) dibagi menjadi 3 yaitu data reduction, data display, conclusion.

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data dengan mengumpulkan, memilih, memfokuskan bagian penting, lalu menentukan pola dan tema. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan data yang didapat.

b. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data dalam bentuk uraian singkat seperti grafik, tabel, diagram dan sejenisnya.

c. *Conclusion* (kesimpulan)

Dari keseluruhan penelitian yang di Tarik Kesimpulan.